

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abbas, Syahrizal. (2018), *Hukum dan Pemerintahan Aceh dalam Bingkai NKRI*, Banda Aceh: Ar-Raniry.
- Ali, Zainuddin. (2013), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimly. (2006), *Teori Hans Kelsen, Teori Hukum*, Jakarta: Sekretaris Jenderal & Kepaniteraan MK RI.
- Asshiddiqie, Jimly. (2002), *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Depok: Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI.
- Asshiddiqie, Jimly. (2005), *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, Jimly. (2011), *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Asshiddiqie, Jimly. (2019), *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Atmosudirjo, Prajudi. (1981), *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bachtiar, (2019), *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang: Unpam Press.
- Budiarjo, Miriam. (2008), *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Budiarjo, Miriam. (2008), *Demokrasi di Indonesia: Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Budiarjo, Miriam. (2024), *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi: Cetakan Kedua Puluh*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Djuli, M. Nur. (2010), *Aceh dalam Perspektif Sejarah & Hukum*, Banda Aceh: Pemerintah Aceh.
- HR, Ridwan. (2014), *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ilmar, Aminuddin. (2014), *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta: Prenadamedia Group.

- Indroharto, (1993), *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Buku I)*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- J. Moleong, Lexy. (2007), *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Remaja Rosdakarya.
- Prang, Amrizal. (2020), *Desentralisasi Asimetris Aceh*, Banda Aceh: Bandar Publishing.
- Jonaidi Efendi dan Johnny Ibrahim (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenada Media Grup.
- Kusumaatmadja, Mochtar. (2002), *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Alumni.
- L. Fuller, Lon. (1969), *The Morality of Law*, New Heaven: Yale University Press.
- M. Hadjon, Philipus. (2024), *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Manan, Bagir. (2003), *Lembaga Keprisedenan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2011), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- MD, Mahfud. (2011), *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Montesquieu, 1989, *The Spirint Of The Laws*, London: Cambridge University Press.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Pamuji, Kadar, dkk. (2023), *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara*, Purwoekerto: UNSOED Press.
- Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, (2023), *Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir*. Lhokseumawe.
- Rahardjo, Satjipto. (2006), *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Raz Joseph. (1979), *The Authority of Law: Essays on Law and Morality*, Oxford: Clarendon Press.

Rousseau, Jean-Jacque. (1994), *Discourse on Political Economy and The Social Contract*, New York: Oxford University Press.

Schumpeter. (1976), *Capitalism, Socialism and Democracy*, London: George Allen & Unwin.

Soekanto, Soerjono. (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Soekanto, Soerjono. (2013), *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Suharizal. (2012), *Pemilukada Regulasi, Dinamika dan Konsep Mendatang*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sunaryo, Oyo. (2021), *Hukum Acara Sengketa Pemilu dan Pemilihan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara*, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan.

Utrecht. (1862), *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: Ichtiar.

Yusrizal, 2015, *Modul Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Unimal Press, Lhokseumawe.

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pilkada yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 *juncto* Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggara Pemilu/Pilkada di Aceh.

Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 *juncto* Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pilkada.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan.

Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah.

PKPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah.

C. Artikel, Majalah & Surat Kabar

Asshidiqie, Jimly. (2004), “Pemilihan Langsung Presiden dan Wakil Presiden,” *Jurnal Unisia*, vol. 27 (51).

Baihaqi, Irham. (2025), *Kebijakan Panwaslih Kota Lhokseumawe dalam Pencegahan Pelanggaran Pilkada 2024 (Studi pada Panwaslih Kota Lhokseumawe)*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Malikussaleh.

Bawaslu Kota Depok, *Sejarah Pilkada di Indonesia: Dari Penunjukan hingga Dipilih Langsung oleh Rakyat Bawaslu*, diakses pada 20 September 2025, Pukul. 14.30 WIB.

Dede Harison, *Sah Pilkada Aceh Tamiang lawan Kotak Kosong*, Antara News Aceh, diakses pada tanggal 23 Januari 2026, Pukul. 15.45 WIB.

Elidar Sari, Arif Rahman, Faisal, dan Muksalmina. (2024), “Dinamika Politik Partai Lokal di Aceh Menjelang Pemilu 2024, *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*,

Fahmi, Khairul dkk. (2024), “Penyelesaian Dualisme Kelembagaan Lembaga Pengawas Pemilihan Umum di Provinsi Aceh,” *Jurnal Konstitusi*, vol. 1 (1).

Haris, Syamsuddin. (2015), “Pembinaan Hukum Nasional,” *Jurnal Rechtsvinding Media*, vol. 4 (1).

Indra Permana, Tri Cahya. (2018), “Dinamika Sikap PTUN Terhadap PTUN terhadap Sengketa Pemilihan Kepala Daerah,” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, vol. 7 (2).

Khuwailid, Muhammad. (2018), *Analisa Peran Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang dalam Penegakan Hukum Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang 2017*, Tesis, Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area.

KPU KAB-TANGERANG - *Histori Pilkada di Indonesia*, diakses pada tanggal 19 Desember 2025, Pukul 22.24 WIB.

- Lamkaruna, Dewi Putri. (2023), *Peran Panwaslih Aceh Utara pada Pemilu Tahun 2019 dalam Upaya mewujudkan Pemilu yang Jurdil*, Skripsi, Program Studi Ilmu Politik Universitas Malikussaleh.
- M, Siregar. (2020), “Tantangan Pengawasan Pemilu di Aceh,” *Jurnal Ilmu Politik*, vol. 15 (1).
- M. Ridwansyah, Z. Zakiyyah, Z. Abidin, (2025), “The Dynamics of The Aceh Special Local Election Following the Constitutional Court Ruling”, *Journal of Dual Legal Systems*, vol. 2 (2).
- Muabezi, Zahermann Armandz. (2017), “Negara Berdasarkan Hukum bukan Kekuasaan,” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, vol. 6 (3).
- Muhammad Amin, *Panwaslih Aceh Tamiang Tolak Permohonan Sengketa Pemilihan Yang Diajukan Hamdan-Febriadi*, Kabar Tamiang.com, diakses pada tanggal 23 Januari 2026, Pukul. 16.10. WIB.
- Muhammad Fajar Hendrawan & Zainal Abidin, (2022), “Kedudukan Pasal 65 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2006 terhadap UU No. 6 Tahun 2020 tentang Pemilu”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kenegaraan*, Universitas Syiah Kuala, vol. 6 (4).
- Putra, F.A Satria. (2020), “Problematic of Local Political Party Formation in Papua,” *Internasional journal of Social Science and Human Research*, vol. 3 (5).
- Redaksi, *Gugatan Sengketa Pemilihan Ditolak, Kuasa Hukum Hamdan-Febriadi akan Banding ke PT. TUN*, Kabar Tamiang.com, diakses pada tanggal 23 Januari 2026, Pukul 16. 20. WIB.
- Ridua, Srye Micze. (2025), “Pemilihan Kepala Daerah Melalui DPRD dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” *Honeste Vivere Journal*, Vol. 35 (2).
- Rusyidi, Farhan, (2020), *Kewenangan Panwaslih Aceh dalam Menyelesaikan Sengketa Proses Pemilihan Umum*, Tesis, Program Magister Hukum UIN Ar-Raniry.
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia | Inilah Pokok-Pokok Perppu Pilkada-Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Diakses pada tanggal 21 Desember 2025, Pukul. 15.05 WIB.
- Shadli, Mukhlis & Yusrizal. (2023), “Analisis Putusan DKPP dalam Pengawasan Etik Penyelenggaraan Pemilu di Aceh”, *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, vol. 11 (1).

Taqiyuddin Faranis, Husni, dan Mahdi Syahbandir, (2017), “Kedudukan Surat Edaran Bawaslu RI di Aceh,” *Syiah Kuala Law Journal*, vol. 1 (1).

Teuku Raja Keumangan, 2020, *Pernyataan dalam Antara News 22 Nov 2020*, Legislator berharap pemerintah izinkan Pilkada Aceh mengacu pada UUPA, diakses pada tanggal 23 Desember 2025, Pukul. 10.15. WIB.

Unimal News, *Penguatan Kelembagaan Jadi Kunci Efektivitas Pengawasan Pemilu*, diakses pada tanggal 12 Oktober 2025, Pukul. 14. 47. WIB.

Waspada.id, *Panwaslih Aceh Tamiang Terima Permohonan Sengketa Paslon Hamdan Sati-Febriadi*, diakses pada tanggal 23 Januari 2026, Pukul. 16.30. WIB.